

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Media Eduenvid

1. Pengertian Media Eduenvid

Media *Eduenvid* (*Educational Environment Video*) adalah media pembelajaran berbasis video yang menampilkan aktivitas nyata di lingkungan sekitar peserta didik. Media ini dirancang untuk menyampaikan materi pembelajaran secara kontekstual dan konkret, sehingga siswa dapat memahami pelajaran dengan mengaitkannya pada pengalaman kehidupan sehari-hari (Santi et al., 2023). Konten video dalam *Eduenvid* mencerminkan situasi sosial atau lingkungan yang dekat dengan siswa, seperti kegiatan gotong royong, menjaga kebersihan lingkungan, atau perilaku disiplin. Dengan cara ini, konsep-konsep abstrak seperti hak dan kewajiban menjadi lebih mudah dipahami karena disajikan dalam bentuk visual nyata yang sesuai dengan dunia siswa (Ramadhani & Masykuroh, 2022). Selain itu, penggunaan media *Eduenvid* juga berkontribusi terhadap pembentukan karakter siswa. Pembelajaran yang memanfaatkan video berbasis lingkungan mampu menumbuhkan rasa cinta tanah air, kepedulian sosial, dan tanggung jawab terhadap lingkungan ((Nugroho & Surjono, 2019).

2. Kelebihan Media Eduenvid

Media *Eduenvid* menawarkan keunggulan dalam menyajikan materi yang kontekstual dan visual sehingga memudahkan pemahaman siswa. Video animasi dirancang dengan warna, narasi sederhana, dan tokoh yang dekat dengan kehidupan siswa SD, sehingga konsep abstrak seperti hak dan kewajiban dapat dipahami dengan lebih nyata dan menyenangkan. Hal ini membuat proses belajar lebih interaktif dan sesuai dengan gaya belajar visual dan auditif anak-anak. Dengan visual yang menarik dan narasi sesuai usia, *EduEnVid* juga menjadi sarana efektif untuk

mengintegrasikan nilai-nilai karakter, selaras dengan tujuan Pendidikan Pancasila (Batubara & Ariani, 2018).

Selain itu, Eduenvid mampu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa secara signifikan dalam proses pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian pada pengembangan media video animasi untuk materi hak dan kewajiban, video animasi terbukti valid dan sangat layak digunakan sebagai bahan ajar, serta efektif dalam memicu siswa lebih aktif bertanya atau berdiskusi dibanding metode ceramah konvensional. Media ini juga mendukung pendekatan pembelajaran berdiferensiasi video bisa diulang atau dijeda sesuai kecepatan belajar siswa sejalan dengan prinsip Kurikulum Merdeka tentang fleksibilitas dan kemandirian belajar.

3. Kekurangan Media Eduenvid

Walaupun media *Eduenvid* memiliki berbagai keunggulan dalam meningkatkan pemahaman siswa, terdapat sejumlah kelemahan yang perlu diperhatikan, terutama dalam konteks penggunaannya di tingkat Sekolah Dasar. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain:

a. Ketergantungan pada Teknologi

Media *Eduenvid* sangat bergantung pada ketersediaan perangkat teknologi seperti laptop, proyektor, speaker, dan jaringan internet. Jika sekolah tidak memiliki infrastruktur yang memadai, maka media ini tidak dapat digunakan secara optimal (Afifuddin et al., 2023).

b. Keterbatasan Interaktivitas

Meskipun menyajikan konten visual dan audio yang menarik, *Eduenvid* bersifat satu arah dan tidak memungkinkan interaksi langsung antara siswa dan materi. Ini dapat membatasi partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran (Santi et al., 2023).

c. Kesulitan Teknis

Penggunaan video dalam pembelajaran dapat menghadapi kendala teknis seperti format video yang tidak kompatibel, durasi loading yang lama, atau gangguan suara yang mengganggu pemahaman siswa (Ramadhani & Masykuroh, 2022).

d. Kurangnya Konteks Lokal

Beberapa video *Eduenvid* bersifat umum dan tidak mencerminkan kondisi sosial-budaya lokal siswa. Hal ini dapat menyebabkan materi terasa asing dan kurang relevan bagi siswa, sehingga menghambat pemahaman nilai-nilai Pancasila yang kontekstual (Nugroho & Surjono, 2019).

e. Keterbatasan Akses oleh Guru dan Siswa

Tidak semua guru memiliki keterampilan teknis dalam mengoperasikan dan mengintegrasikan media video dalam pembelajaran. Sementara itu, siswa yang berasal dari latar belakang ekonomi lemah mungkin tidak memiliki perangkat pendukung di rumah untuk mengakses ulang materi (Prehanto et al., 2021).

f. Tidak Bisa Berdiri Sendiri

Media *Eduenvid* tidak dapat sepenuhnya menggantikan peran guru. Pemahaman siswa terhadap materi tetap memerlukan bimbingan langsung dari guru untuk memberikan penjelasan, klarifikasi, dan evaluasi (Putri & Dewi, 2022)

B. Pemahaman Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila

1. Pengertian Pemahaman

Pemahaman dalam ranah kognitif menurut taksonomi Bloom yang direvisi (2001) merujuk pada kemampuan untuk membangun makna dari informasi — bukan hanya mengingat, tetapi juga menafsirkan, menjelaskan, mengklasifikasi, dan membuat hubungan antara konsep. Proses ini mencakup tindakan seperti menginterpretasi ide, memberi contoh, menjelaskan secara jelas, dan membuat kesimpulan dari informasi yang dipelajari. Pemahaman ini berada pada level kedua (C2: Understand) setelah mengingat (C1) dan menjadi fondasi untuk kemampuan berpikir tingkat lebih tinggi seperti menganalisis (C4), mengevaluasi (C5), dan mencipta (C6) (Listiani & Rachmawati, 2022).

Lebih lanjut, implementasi taksonomi Bloom revisi dalam penelitian pendidikan menunjukkan bahwa penerapan indikator pemahaman ini bisa meningkatkan kualitas pembelajaran dan evaluasi konsep matematis maupun tematik. Sebagai contoh, dalam penelitian penerapan Bloom revisi pada materi matematika, siswa didorong untuk tidak sekadar menghafal rumus tetapi benar-benar memahami konsep sehingga mampu menerapkan atau menjelaskannya ulang dalam situasi baru. Dengan demikian, pemahaman tidak hanya mencakup aktivitas pasif menerima informasi, tetapi juga transformasi kognitif yang aktif.

2. Pendidikan Pancasila

Pendidikan Pancasila merupakan suatu proses pembelajaran yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai dasar ideologi Pancasila kepada peserta didik agar mampu menginternalisasi, memahami, serta mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kaelan (2013), Pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan sistematis dalam mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi juga menyebutkan bahwa Pendidikan Pancasila merupakan salah satu mata kuliah wajib dalam pendidikan tinggi di Indonesia. Hal ini menegaskan posisi penting Pendidikan Pancasila dalam pembentukan karakter bangsa.

3. Materi Hak & Kewajiban

a. Pengertian Hak

Hak merupakan sesuatu yang secara moral atau legal menjadi milik seseorang dan harus dihormati oleh pihak lain. Menurut Soerjono Soekanto (1982), hak adalah kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilanggar oleh pihak lain. Hak melekat pada individu sejak lahir, dan dalam konteks tertentu bahkan sebelum kelahiran, seperti hak atas kehidupan.

Dalam perspektif hukum, hak dapat diartikan sebagai kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Utrecht (1983) menjelaskan bahwa hak adalah wewenang yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau untuk menuntut sesuatu dari pihak lain.

Jenis-jenis hak pun beragam, tergantung pada konteksnya:

- 1) Hak asasi manusia (HAM): Hak yang melekat sejak lahir, seperti hak hidup, hak berpendapat, hak memeluk agama, dan sebagainya.
- 2) Hak hukum: Hak yang timbul karena peraturan perundang-undangan, seperti hak atas warisan, hak atas tanah, dan hak cipta.
- 3) Hak sosial: Hak yang diperoleh karena keberadaan individu dalam masyarakat, seperti hak atas pendidikan dan kesehatan.

b. Tujuan Pendidikan Pancasila

Tujuan utama Pendidikan Pancasila adalah membentuk warga negara yang memiliki kepribadian nasional dan karakter kuat yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), Pendidikan Pancasila menjadi fondasi utama dalam pembangunan karakter bangsa.

Menurut Suriasumantri (2001), Pendidikan Pancasila bertujuan untuk:

- 1) Menanamkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa.
- 2) Membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma-norma Pancasila.
- 3) Menumbuhkan semangat cinta tanah air dan kesadaran berbangsa dan bernegara.
- 4) Membangun toleransi dan sikap demokratis dalam kehidupan masyarakat.

c. Nilai-Nilai Dasar dalam Pendidikan Pancasila

Pancasila terdiri atas lima sila yang masing-masing mengandung nilai-nilai fundamental yang harus ditanamkan dalam dunia pendidikan. Menurut Notonagoro (1983), nilai-nilai dasar Pancasila dibagi menjadi tiga dimensi utama: nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis.

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa: Menanamkan nilai religiusitas dan keimanan.
- 2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Mengajarkan nilai humanisme, keadilan, dan kesetaraan.

- 3) Persatuan Indonesia: Menekankan pentingnya nasionalisme dan cinta tanah air.
- 4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Mendorong nilai demokrasi, musyawarah, dan partisipasi aktif.
- 5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Menumbuhkan kesadaran sosial dan keadilan distributif.

d. Pengertian Kewajiban

Kewajiban merupakan beban atau tanggung jawab yang harus dilakukan oleh individu terhadap orang lain, masyarakat, atau negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan; sesuatu yang diwajibkan atau tugas.

Menurut Hans Kelsen (2005), kewajiban timbul dari norma hukum yang bersifat imperatif, yaitu perintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kewajiban merupakan kebalikan dari hak, namun keduanya saling berkaitan. Setiap hak yang dimiliki oleh seseorang akan menimbulkan kewajiban pada pihak lain untuk menghormati dan memenuhinya.

Kewajiban dapat dibagi menjadi:

- 1) Kewajiban moral: Bersumber dari nilai-nilai etika, seperti kewajiban menolong sesama.
- 2) Kewajiban hukum: Diatur oleh peraturan perundang-undangan, seperti kewajiban membayar pajak.
- 3) Kewajiban sosial: Berkaitan dengan peran sosial dalam masyarakat, seperti kewajiban menjaga kebersihan lingkungan.

e. Hubungan antara Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling melengkapi dan saling menyeimbangkan. Dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, pengakuan terhadap hak individu harus dibarengi dengan kesadaran akan kewajiban yang harus dijalankan oleh individu tersebut.

Menurut John Locke dalam teorinya tentang kontrak sosial, individu menyerahkan sebagian hak alamiahnya kepada negara demi memperoleh perlindungan dan kenyamanan hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini, negara berkewajiban untuk melindungi hak-hak warganya, sedangkan warga negara berkewajiban untuk menaati hukum dan norma yang berlaku.

Ketidakeimbangan antara hak dan kewajiban dapat menimbulkan konflik sosial. Jika seseorang menuntut hak tanpa memenuhi kewajiban, maka akan terjadi ketimpangan yang merugikan pihak lain. Sebaliknya, jika seseorang hanya dibebani kewajiban tanpa diberi hak yang semestinya, maka terjadi ketidakadilan.

C. Kajian Penelitian Yang Relevan

1. Rachmawati (2020) dalam jurnal yang berjudul “Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Sekolah” menyatakan bahwa Implementasi sistem informasi berhasil ketika pelatihan diberikan secara menyeluruh kepada staf, terdapat dukungan penuh dari kepala sekolah, dan infrastruktur teknologi memadai. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa selain aspek kebijakan, implementasi juga sangat bergantung pada kesiapan sumber daya dan sikap pelaksana (disposisi), sesuai dengan teori Edwards III (1980).
2. Yudo Baskoro (2023) dalam jurnal yang berjudul “Implementasi kebijakan mal pelayanan publik di Kabupaten Lamongan” menyatakan bahwa implementasi MPP telah berjalan dengan baik namun belum maksimal, dengan hambatan seperti kurangnya sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai. Menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks pelaksanaannya, sesuai dengan teori Grindle.
3. Dewi N.M dkk (2022) dalam jurnal yang berjudul “Media pembelajaran yang berbasis video animasi berbasis teknologi” menyatakan bahwa media ini mampu meningkatkan partisipasi

- aktif siswa dan membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Penelitian ini relevan karena menunjukkan efektivitas media animasi sebagai sarana pendidikan yang menarik dan interaktif.
4. Indriani R (2020) dalam jurnal yang berjudul “Efektivitas video animasi dalam pembelajaran IPS pada materi interaksi sosial” menyatakan bahwa penggunaan video animasi dapat meningkatkan pemahaman konsep dan hasil belajar siswa. Pendekatan yang digunakan dalam video membantu siswa mengaitkan konsep abstrak dengan kehidupan nyata.
 5. Prasetyo (2020) melakukan penelitian berjudul “*Pengaruh Model Project-Based Learning terhadap Pemahaman Konsep Biologi Siswa Kelas XI*”. Penelitian ini dilakukan di salah satu SMA negeri dan menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran berbasis proyek mampu meningkatkan pemahaman konseptual siswa secara signifikan dibandingkan pembelajaran konvensional.
 6. Wahyuni (2021) dalam jurnal “Penerapan Media E-Book Interaktif untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca Pemahaman Siswa Sekolah Dasar” menyimpulkan bahwa e-book interaktif mampu meningkatkan minat dan pemahaman membaca siswa kelas IV. Dalam penelitian ini, siswa menjadi lebih aktif dalam membaca dan mampu menjawab pertanyaan bacaan dengan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi setelah penggunaan e-book.
 7. Hidayat (2020) melalui penelitiannya yang berjudul “Pendidikan Pancasila Sebagai Upaya Pembentukan Karakter Religius Siswa SMA” mengemukakan bahwa pembentukan karakter tidak hanya terjadi di dalam kelas, tetapi juga dapat dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang mengandung nilai-nilai Pancasila, seperti kegiatan sosial, keagamaan, dan kepemimpinan.
 8. Utami dan Suryani (2021) dalam jurnal berjudul “Peran Guru PPKn dalam Pembentukan Perilaku Peserta Didik Sesuai Nilai-Nilai Pancasila” menjelaskan bahwa guru memiliki peran strategis sebagai model dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang demokratis, inklusif, dan berlandaskan musyawarah. Penelitian ini menegaskan bahwa keteladanan guru merupakan faktor penting dalam keberhasilan pendidikan karakter.
 9. Rahmat Hidayat (2020) dalam jurnal yang berjudul “Analisis Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia” menyatakan bahwa masih terdapat ketimpangan antara hak yang dituntut warga negara dan kewajiban yang dijalankan. Salah satu penyebab utamanya adalah lemahnya penegakan hukum dan kurangnya edukasi kewarganegaraan yang menyeluruh. Penelitian ini juga mengkritisi pelaksanaan Pasal 28J UUD 1945 yang masih belum efektif diterapkan.

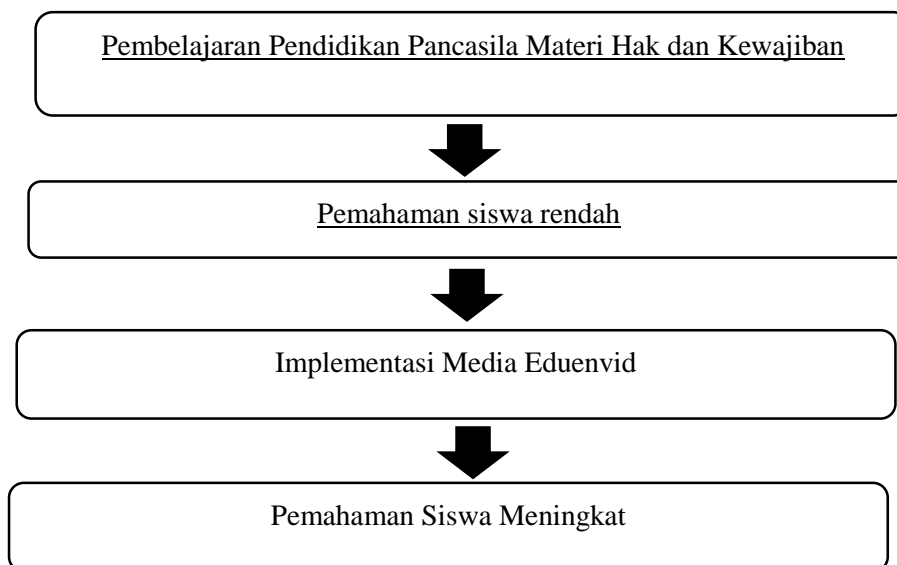
10. Arifin dan Susanti (2022) dalam jurnal yang berjudul “Analisis Peran Media dalam Menumbuhkan Kesadaran Hak dan Kewajiban Warga Negara” menyatakan bahwa media massa, khususnya media sosial, berperan besar dalam menyampaikan informasi dan edukasi terkait hak dan kewajiban warga negara. Namun, disinformasi juga menjadi tantangan besar karena dapat memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap konsep hak dan kewajiban.

D. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa penggunaan media pembelajaran yang kreatif dan interaktif mampu meningkatkan efektivitas kegiatan belajar-mengajar serta memperdalam pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila, khususnya topik Hak dan Kewajiban, diperlukan media yang mampu menyampaikan pesan moral dan nilai-nilai kebangsaan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami oleh siswa sekolah dasar.

Media *Eduenvid*, yang berbasis digital, menghadirkan pendekatan baru dalam menyampaikan materi pelajaran. Dengan dukungan tampilan visual yang menarik, unsur interaktivitas, serta konten yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, media ini diharapkan mampu membangkitkan motivasi belajar siswa, meningkatkan partisipasi aktif mereka dalam proses belajar, dan mendukung guru dalam menyampaikan materi secara lebih efisien.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dibangun atas keyakinan bahwa penggunaan *Eduenvid* akan berpengaruh terhadap pemahaman siswa mengenai Hak dan Kewajiban. Melalui metode deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi proses pelaksanaan media tersebut di kelas dan menelaah tanggapan dari siswa maupun guru. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai efektivitas *Eduenvid* dalam menunjang pembelajaran Pendidikan Pancasila.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir